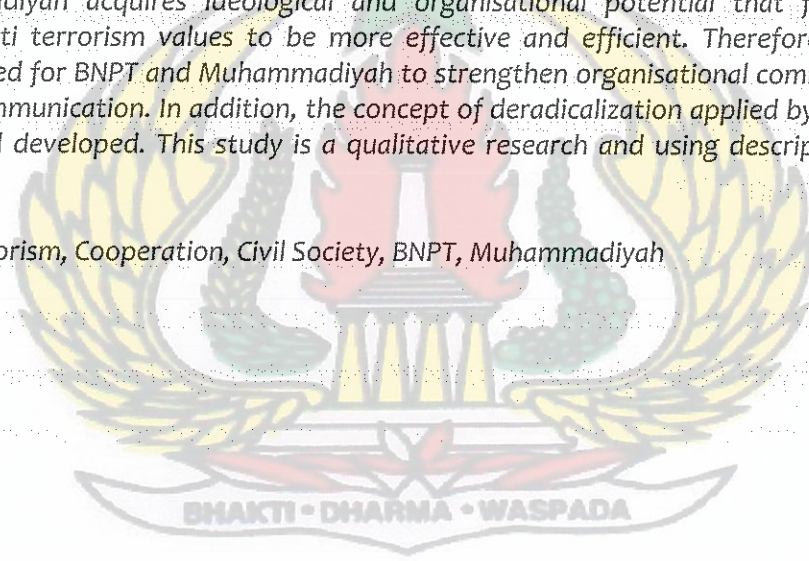


KERJA SAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DAN CIVIL SOCIETY : Suatu Kasus Mengenai Ketidakterlibatan Muhammadiyah

Rima Sari Indra Putri¹

Abstract- This research is about the anti-terrorism cooperation between the National Agency for Contra Terrorism (BNPT) and civil society with study case of Muhammadiyah disengagement in the signing of Memorandum Of Understanding (MOU) between BNPT and Islamic organizations in 2011. The theory applies are Terrorism, Security sector reform and Cooperation. As civil society, Muhammadiyah has conducted anti-terrorism efforts through its structural and cultural approach in politic, socio-economic, diplomatic and education aspect; without labelling its programmes as anti-terrorism or deradicalization. Unfortunately, there has not been any framework of cooperation established between Muhammadiyah and BNPT, due to several hindering factors. Firstly, Muhammadiyah and BNPT have different perspective in addressing issues about terrorism motives and anti terrorism methodology. Secondly, is political conflict. Thirdly, is related with BNPT's constraints in time, human resources and funding. Forthly, is the lack of political will on BNPT's side. Actually, Muhammadiyah acquires ideological and organisational potential that facilitate the dissemination of anti terrorism values to be more effective and efficient. Therefore, this study recommends the need for BNPT and Muhammadiyah to strengthen organisational commitment and to start building communication. In addition, the concept of deradicalization applied by BNPT needs to be evaluated and developed. This study is a qualitative research and using descriptive analysis method.

Keywords: Anti Terrorism, Cooperation, Civil Society, BNPT, Muhammadiyah



¹ Mahasiswi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Jakarta.

Pendahuluan

Upaya anti terorisme idealnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, namun rupanya kebijakan anti terorisme di Indonesia tampaknya belum mampu membangun sinergitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Banyak wacana mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya memanfaatkan peran ormas Islam dalam upaya pencegahan terorisme.² Pada awal terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *The International Crisis Group* merekomendasikan agar BNPT melibatkan dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU).³ Pelibatan ormas Islam dipandang penting karena 87% penduduk Indonesia adalah muslim, sedangkan Muhammadiyah dan NU merupakan representasi komunalitas muslim Indonesia dengan total 90-100 juta pengikut.⁴ Terlebih lagi Ketua BNPT Ansyad Mbai pernah mengatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia kebanyakan didalangi oleh kelompok radikal.⁵ Konsekuensi populasi pada akhirnya melekatkan terorisme bermotif radikalisme dengan radikalisme Islam. Oleh karena itu, peran ormas Islam dipandang penting dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

Pelibatan Muhammadiyah dan NU seharusnya dilakukan secara komprehensif. Namun, selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah lebih merangkul NU daripada Muhammadiyah. Pada Agustus 2011, BNPT menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan sejumlah ormas Islam dalam rangka penanggulangan terorisme.⁶ Sementara, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tidak tahu

² Gatot, "Kebutuhan Program Deradikalisasi untuk Pemberantasan Terorisme", 7 September 2009, *Center for Detention Studies*, dalam http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=5, diunduh pada 14 September 2011.

³ "BNPT urged to design terrorism prevention programs", *Thejakartapost.com*, 19 April 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/19/bnpturged-design-terrorism-prevention-programs.html>, diunduh pada 24 Oktober 2011.

⁴ Surwandono, "Dialektika NU dan PKB", dalam

surwandono.staff.ums.ac.id/page/files/.../DIALEKTIKA-NU-DAN-PKB.do, 2011.

⁵ "Tewasnya Osama Tidak Mengurangi Aksi Teroris di Indonesia", *FaktaPos.com*, 3 Mei 2011, dalam <http://www.faktapos.com/content/nasional/5850-tewasnya-osama-tidak-mengurangi-aksi-teroris-di-indonesia.html>, diunduh pada 13 September 2011. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang juga menempatkan radikalisme sebagai faktor terutama aksi teror di Indonesia, pada Ceramah Penerimaan Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lembaga Ketahanan Nasional (Lenhannas) RI Tahun 2011 dan Mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Jakarta.

⁶ C. N. Saputra, "BNPT dan Ormas Islam Teken MoU Pencegahan Terorisme", *okezone.com*, 11 Agustus 2011, dalam <http://news.okezone.com/read/2011/08/11/337/490871/bnpt-ormas-islam-> diunduh pada 24 Oktober 2011.

menahu mengenai penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut,⁷ sebagaimana juga dinyatakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin:

"Selama ini kami (Muhammadiyah) tidak pernah sama sekali dihubungi untuk dilibatkan dalam upaya menangkal terorisme. Kami tidak pernah diberitahu di mana kantong-kantong jaringan teroris yang selama ini diberitakan pemerintah sudah diketahui dan terpantau".⁸

Meskipun begitu, Muhammadiyah menyatakan bahwa terorisme ada dan berbahaya sehingga Muhammadiyah memiliki kesadaran untuk berperan dalam pencegahannya, dengan atau tanpa pemerintah.⁹

Berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah peran Muhammadiyah dalam upaya anti terorisme selama ini? dan *Kedua*, Mengapa Muhammadiyah tidak dilibatkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara BNPT dan ormas Islam, pada tahun 2011, dalam upaya anti terorisme? Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran-peran Muhammadiyah dalam upaya anti terorisme, dan melakukan analisis kritis serta evaluasi terhadap ketidakterlibatan Muhammadiyah dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut.

Dasar Teori

Penelitian ini menggunakan teori keamanan non-tradisional, anti terorisme dan kerjasama. Ronald Crelinsten menyebut terorisme sebagai ancaman keamanan "abu-abu" yang kompleks dan bersifat transnasional. Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan aktor keamanan inti, namun juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Crelinsten mengemukakan tentang strategi komprehensif kontraterorisme yang menggabungkan pendekatan *hard model* dengan *soft model*. *Hard model* adalah pendekatan koersif yang tidak akan dibahas dalam

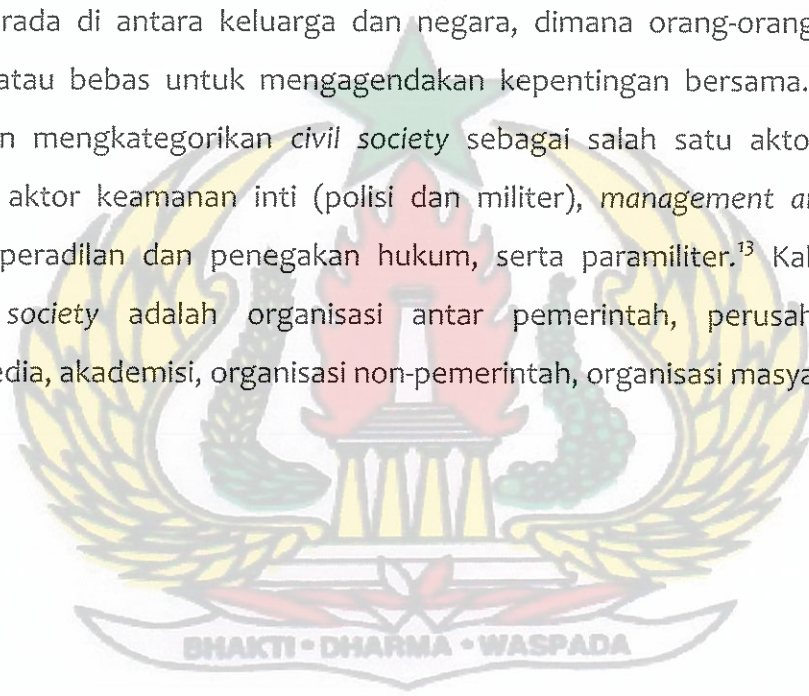
⁷Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁸J. S. Mulyadi, "Muhammadiyah Tidak Dilibatkan Deradikalisasi", *Kompas.com*, 3 Oktober 2011, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/03/2245443/Muhammadiyah>. Ti, diunduh pada 24 Oktober 2011.

⁹Wawancara dengan Y. Warsim, 24 Oktober 2011. Yusuf Warsim adalah Sekretaris Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

penelitian ini. *Soft model* adalah pendekatan preventif, proaktif, persuasif dan bersifat jangka panjang, untuk selanjutnya disebut upaya Anti Terorisme. *Soft model* bergerak lebih luas dari ranah militer dengan turut mempertimbangkan unsur sosial, politik, ekonomi dan mutlak memerlukan keterlibatan masyarakat. Beberapa upaya anti terorisme menurut Crelinsten adalah melalui *development*, penegakan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan tata pemerintahan yang akuntabel dan transparan, *Cross Cultural Dialogue*, dan pendidikan.¹⁰ Anak Agung Banyu Perwita mengemukakan pentingnya demokrasi dalam penanganan terorisme di Indonesia.¹¹ Peneliti merangkum beberapa teori anti terorisme dalam bagan Anti Terorisme Komprehensif (ket: lihat Gambar 3).

Civil society adalah representasi masyarakat mencakup semua individu, organisasi, institusi yang berada di antara keluarga dan negara, dimana orang-orang berhimpun secara sukarela atau bebas untuk mengagendakan kepentingan bersama.¹² Reformasi Sektor Keamanan mengkategorikan *civil society* sebagai salah satu aktor keamanan nasional setelah aktor keamanan inti (polisi dan militer), *management and oversight bodies*, institusi peradilan dan penegakan hukum, serta paramiliter.¹³ Kalangan yang tergolong *civil society* adalah organisasi antar pemerintah, perusahaan/institusi multinasional, media, akademisi, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat.¹⁴



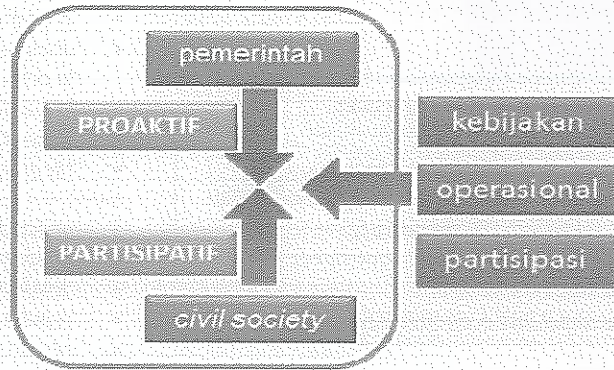
¹⁰R. Crelinsten, *Counter Terrorism*, (Cambridge UK: Polity Press, 2009).

¹¹A. A. Perwita, "Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2005. Paul Wilkinson juga sependapat dengan mengatakan: "Clear that liberal democracies have been extraordinarily resilient in withstanding terrorist attempts to coerce them into major changes of policy or surrender in the face of the terrorists' demands" Lihat di T. Maley, *Democratic Response to Terrorism*. Module of Indonesia Defense University and Cranfield University, 2011.

¹²S. Markus, "Mengukur Peran Muhammadiyah di Ruang Publik Menuju Peradaban Utama. Di Muhammadiyah", *Kajian Ramadhan 1431 H*, (Jakarta: Muhammadiyah, 2011).

¹³A. M. Fitz-Gerald, *Security Sector Reform: Theory and Practice*. Module of Indonesia Defense University and Cranfield University, 2 Februari 2010.

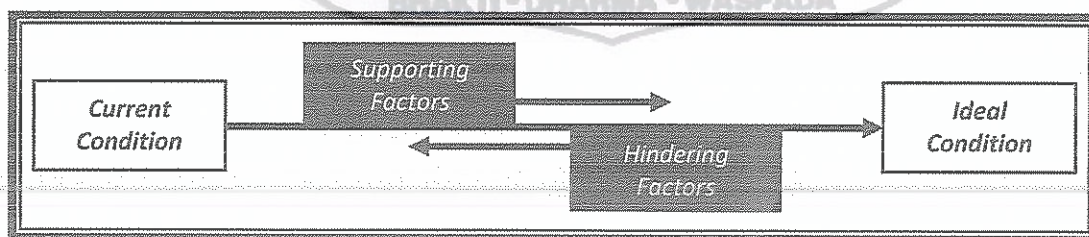
¹⁴R. Crelinsten, *Op. Cit.* hlm. 21-22.



Gambar 1. Kerjasama Pemerintah dan Civil Society

Terkait kerjasama antara pemerintah dan *civil society* dapat dilihat pada tataran kebijakan, operasional dan partisipasi. Kerja sama adalah dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis dalam rangka mencapai tujuan bersama.¹⁵ Beberapa prinsip umum kerja sama adalah konsensus, norma yang mengatur, saling percaya, saling menguntungkan, prioritas, komunikasi, timbal balik.¹⁶ Terkait kerja sama tersebut, Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Bambang Pranowo mengatakan bahwa idealnya pemerintah terhadap masyarakat *proaktif* dan masyarakat terhadap pemerintah *partisipatif*.¹⁷

Kemudian, peneliti memakai salah satu alat analisis manajemen, yang dinamakan *Force Field Analysis* (FFA), dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk mencapai sasaran perubahan.

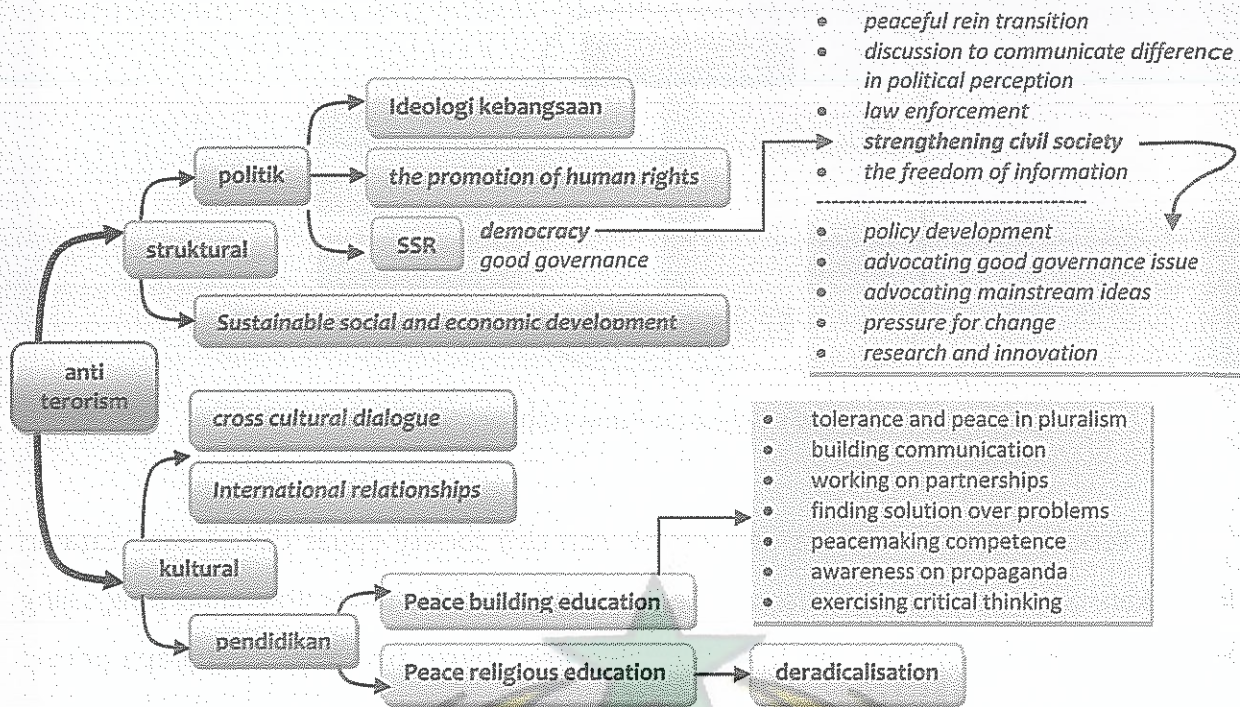


Gambar 2. Force Field Analysis

¹⁵Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah*, 1985, hlm. 12-13.

¹⁶N.D. Zainudin, Edralin dan Whitaker dalam Keban dan S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

¹⁷Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012.



Gambar 3. Anti Terorisme Komprehensif

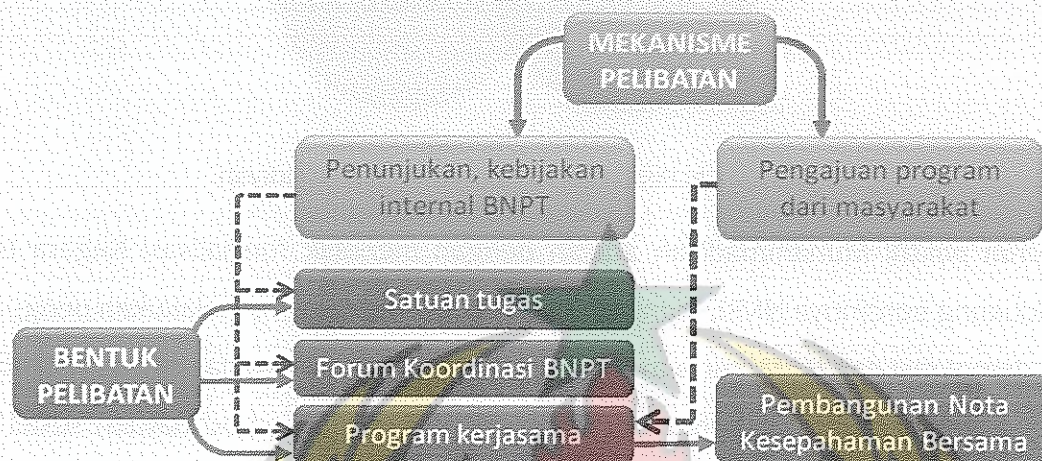
Kebijakan Penanganan Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Melibatkan Civil Society

Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, mendefinisikan terorisme sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Maka, pada 16 Juli 2011 dibentuk badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).¹⁸ Visi BNPT adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya membangun sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerja sama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.¹⁹

¹⁸Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014, (Jakarta: BNPT, 2011), hlm. 4

¹⁹Ibid, hlm.28

Adapun bentuk pelibatan *civil society* oleh BNPT adalah Satuan Tugas, forum koordinasi, dan program-program kerja sama.²⁰ Dalam rangka membangun kerja sama dengan masyarakat, BNPT melakukan kajian terhadap beberapa ormas dan lembaga potensial, berdasarkan pertimbangan visi, misi, serta program-program yang dijalankan oleh ormas tersebut. BNPT juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat melalui pengajuan proposal program kegiatan anti terorisme.



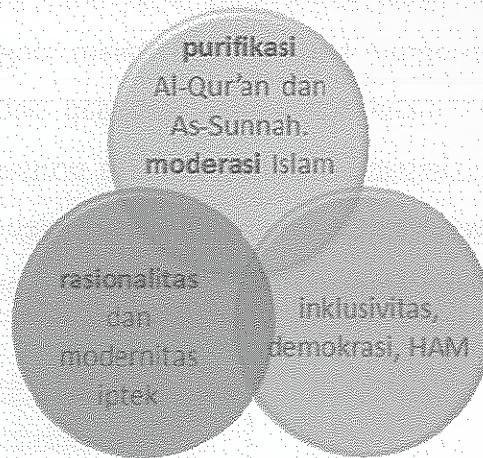
Gambar 4. Bentuk dan Mekanisme Pelibatan *Civil Society* oleh BNPT dalam Upaya Anti Terorisme

Peran Muhammadiyah dalam Upaya Anti Terorisme²¹

Muhammadiyah telah melakukan upaya anti terorisme, melalui peran-peran struktural dan kulturalnya di bidang politik, sosial ekonomi, diplomasi, dan pendidikan (kultural), meskipun tanpa 'heading' anti terorisme.

²⁰Perpres RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT Pasal 23, yaitu tentang Satuan Tugas (Satgas) berbunyi: (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah dapat berasal dari kalangan TNI, Polri, institusi tertentu, seperti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama; organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Wawancara dengan A. Sanusi, 16 November 2011. Kemudian Perpres RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa BNPT memiliki tugas dan fungsi koordinasi yang dilaksanakan dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat.

²¹ Lihat Rima S.I. Putri, *BNPT dan Civil Society, Studi Kasus: Ketidakterlibatan Muhammadiyah Dalam Nota Kesepahaman Bersama Antara BNPT dan Organisasi Massa Islam*, Tesis S2, (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2011)



Gambar 5. Pendekatan Kultural Muhammadiyah

Peran politik Muhammadiyah adalah dengan menolak formalisasi Negara Islam dan mendukung berdirinya NKRI, mengembangkan *civic education*, melakukan penguatan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta mendukung penegakan hukum dan *good governance*. **Peran sosial dan ekonomi** Muhammadiyah dilakukan dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berfokus pada masyarakat bawah, serta melakukan *interfaith based humanitarian program*.²² **Peran diplomasi** Muhammadiyah bertujuan untuk menjembatani konflik antar peradaban, menghilangkan *Islamophobia* dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, salah satunya melalui *World Peace Forum*, forum dialog internasional yang digagas Muhammadiyah. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan bekemajuan, Muhammadiyah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Pemerintah Australia dalam bidang kerjasama pendidikan, pertukaran budaya, penguatan demokrasi, *good governance*, pembangunan masyarakat toleran, peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Pendekatan kultural** Muhammadiyah yang dilakukan melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah, juga bermuatan nilai-nilai anti terorisme karena menanamkan tiga hal, yaitu, Islam moderat, rasionalitas dan nilai-nilai modern, seperti demokrasi, HAM, dan inklusivitas.

Muhammadiyah menyatakan tidak mengadopsi *framework* anti terorisme global. Dengan begitu, Muhammadiyah merasa perannya lebih substantif *ketimbang* normatif,

²²*Interfaith program* untuk meredam kebencian antar agama .

menjangkau masyarakat lebih luas dan berdampak jangka panjang. Hal tersebut juga diakui oleh BNPT dan masyarakat.

Force Field Analysis: Kerja sama BNPT dan Civil Society: Studi Kasus Ketidakterlibatan Muhammadiyah dalam Nota Kesepahaman Bersama antara BNPT dengan Ormas Islam Tahun 2011

1. Kondisi Ideal Hubungan Kerjasama Antara BNPT dan Civil Society

Kondisi ideal hubungan kerja sama antara BNPT dan *civil society*, sebagai salah satu elemen masyarakat, merujuk pada beberapa kebijakan, yaitu *Pertama*, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan:

“Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi etnik, beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut **seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban** memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional”.²³

Selain itu, “Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat **proaktif** yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang”.²⁴ Kemudian, dalam Visi BNPT tercantum:

“Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya membangun **sinergi** antara institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan,

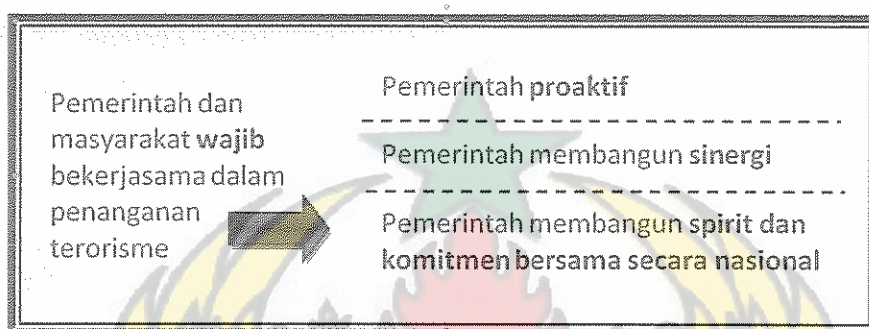
²³Selain itu juga disebutkan, “Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan NKRI” Lihat, *Himpunan Peraturan tentang Penanggulangan Terorisme*, (Jakarta: BNPT, 2011), hlm. 29.

²⁴*Ibid.*

perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional”.²⁵

Selain itu, Mandat Penanggulangan Terorisme adalah:

“Terorisme berawal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan ditengah aktivitas masyarakat sehari-hari sehingga sangat mungkin gejala awal terorisme dapat dideteksi serta dieliminir dengan melibatkan peran masyarakat. Untuk itu perlu dibangun **spirit dan komitmen bersama** secara nasional dalam upaya memerangi terorisme”.²⁶



Gambar 6. Rangkuman Kebijakan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Terorisme

Pada tataran operasional, kebijakan tersebut seharusnya diterjemahkan sebagai berikut: “pemerintah *proaktif* membangun sinergi seluruh komponen bangsa dan masyarakat *partisipatif* terhadap program-program pemerintah”. Namun, yang terpenting adalah pembangunan sinergi, spirit dan komitmen nasional merupakan tanggung jawab terutama pemerintah.²⁷ Secara lebih spesifik, Azyumardi Azra mengatakan bahwa BNPT seharusnya mampu menggandeng Muhammadiyah dan NU secara komprehensif dalam upaya anti terorisme nasional.²⁸

²⁵Ibid., hlm.28

²⁶Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014. (Jakarta: BNPT, 2010)

²⁷Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012.

²⁸Azyumardi Azra, 10 Januari 2011, korespondensi Email; Bambang Pranowo, wawancara pada 12 Januari 2012, dan BNPT.

2. Kondisi Terkini Hubungan Kerjasama Antara BNPT dan *Civil Society*.

Sejak didirikan pada tahun 2010, BNPT telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.²⁹ Seperti telah disebutkan, pada Agustus 2011, BNPT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan berbagai ormas dan lembaga Islam.³⁰ NU adalah pihak yang melakukan inisiasi kerjasama tersebut.³¹ Sementara itu, **hubungan Muhammadiyah dan BNPT belum pernah terbangun dan belum dimulai**, seperti diakui oleh Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Muslich.

Terhadap belum terbangunnya hubungan kerja sama BNPT dan Muhammadiyah dalam upaya anti terorisme nasional, Riefqi Muna menyampaikan kritiknya “Mungkin pemerintah akan bilang sudah, namun sejauh yang saya tahu khususnya dalam bidang *counter terrorism, officially*, belum. BNPT, *they never officially talk to Muhammadiyah. They do talk overseas that Muhammadiyah involved*. Tapi tidak ada ajakan apapun”.³² Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli BNPT Heri, mengatakan: “Kami tidak meragukan jika Muhammadiyah memiliki perhatian besar terhadap ancaman terorisme dan memiliki komitmen untuk memerangnya. Namun, kesulitannya adalah bahwa Muhammadiyah tidak memiliki program anti terorisme”.³³

²⁹Wawancara dengan A. Sanusi, 16 November 2011.

³⁰“BNPT-Ormas Islam Siapkan Deradikalisasi Teroris”, 11 Agustus 2011, dalam http://www.jurnas.com/news/37009/BNPT-Ormas_Islam_Siapkan_Deradikalisasi_Teroris/1/Nasional/Hukum, diunduh pada 8 Desember 2011.

³¹Wawancara dengan Zakky Mubarak, 14 Desember 2011.

³²Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

³³Wawancara dengan Heri, 16 November 2011. Sebenarnya, jauh sebelum Nota Kesepahaman Bersama tersebut dibangun, NU sudah banyak melakukan program deradikalisasi mandiri melalui penanaman paham Islam ‘tengahan’.³³ NU juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Agama RI. NU juga secara eksplisit menyatakan komitmennya, berkali-kali pada media, untuk memerangi terorisme dengan membentuk program-program anti teror. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mendirikan Satgas Deradikalisasi Pelajar.³³ Gerakan Pemuda Anshor membentuk Barisan Serba Guna Detasemen Khusus 99 dalam rangka membantu polisi menghadapi kelompok garis keras yang ingin membubarkan NKRI, mencederai Pancasila dan UUD 1945. Lihat, “Hadapi Kelompok Garis Keras, Banser NU Bentuk Densus 99”, 7 Juli 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/18/logz41-hadapi-kelompok-garis-keras-banser-nu-bentuk-densus-99>, diunduh pada 8 Desember 2011.

Ormas Islam lain yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP). Pada tahun 2010, LAKIP melakukan kajian dan menemukan adanya kecenderungan siswa se-Jabodetabek saat ini tengah mengalami peningkatan pemikiran radikal. Maka kemudian LAKIP mengadakan *Intensive Course for Peace Building*. Hasil kajian dan program, tersebut lantas dipaparkan pada MPR, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Dewan Pertimbangan Presiden, termasuk BNPT, sehingga akhirnya BNPT turut menggandeng LAKIP dalam Nota Kesepahaman Bersama. Lihat, wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012.

3. Faktor-faktor Pendukung Pembangunan Kerjasama BNPT dan Muhammadiyah

Penulis merangkum beberapa kebijakan BNPT untuk melibatkan seluruh *civil society* tanpa terkecuali, termasuk Muhammadiyah. *Pertama*, BNPT menyatakan tidak pilih kasih, seperti dinyatakan Kepala Urusan Umum Anwar Sanusi, bahwa: “BNPT tidak pilih kasih, karena amanat Peraturan Presiden kan jelas, yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pada intinya, BNPT adalah milik bersama”. *Kedua*, unsur politis tidak mempengaruhi keputusan BNPT untuk membangun kerjasama dengan *civil society* tertentu.³⁴ *Ketiga*, tercantum dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional BNPT, bahwa salah satu tantangan BNPT adalah meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi secara bersama-sama dan sekuat tenaga sehingga aksi terorisme di wilayah NKRI dapat dicegah.³⁵ Kebijakan tersebut diterjemahkan dengan gencarnya BNPT melakukan sosialisasi ancaman terorisme, tupoksi BNPT dan bagaimana masyarakat dapat ikut berperan serta.³⁶

Penulis juga merangkum bahwa Muhammadiyah memiliki keprihatinan terhadap ancaman terorisme dan beritikad baik untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam penanganannya. *Pertama*, Muhammadiyah menyatakan terorisme, komodifikasi agama, serta kecenderungan kemunculan gerakan radikal di bidang sosial, politik dan agama sebagai masalah serius yang menjadi perhatian organisasi.³⁷ *Kedua*, Muhammadiyah menyatakan pandangan keislaman yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, dan anti kekerasan.³⁸ *Ketiga*, Muhammadiyah mengatakan bahwa pemerintah seharusnya berada pada garda terdepan untuk memimpin upaya-upaya masyarakat.³⁹ Hal itu menyiratkan bahwa Muhammadiyah menganggap peran pemerintah penting untuk memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan potensi-potensi masyarakat dalam upaya anti terorisme nasional, sekaligus menyiratkan bahwa sikap Muhammadiyah terbuka terhadap pemerintah.

³⁴Wawancara dengan A. Sanusi, 16 November 2011.

³⁵“Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014”, (Jakarta: BNPT, 2011), hlm. 48-49, 66

³⁶Tupoksi: Tugas, tanggung jawab dan fungsi

³⁷Program Muhammadiyah 2010-2015

³⁸Agenda Muhammadiyah Abad Kedua

³⁹Wawancara dengan Y. Warsim, 24 Oktober 2011.

4. Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Kerjasama BNPT dan Muhammadiyah

Terdapat beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terbangunnya kerjasama BNPT dan Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut:

4.1. Perbedaan pandangan terhadap isu dan penanganan terorisme.

Pertama, Muhammadiyah menyesalkan adanya generalisasi terminologi dan nilai Islam yang dilekati stigma negatif terorisme. Terminologi terkait dengan *how do people think of such a thing?* Menurut Muhammadiyah, terminologi-terminologi yang dipakai sebagai referensi terorisme saat ini *jumbled* (campur aduk) dan harus dipertanyakan secara kritis.⁴⁰ Sebagaimana menjadi paradigma internasional, ancaman terorisme selalu dikaitkan dengan Islam; meskipun dalam konteks radikalisme. Paradigma tersebut terkesan juga menjadi persepsi pemerintah. Meskipun hal itu, menurut penulis, adalah konsekuensi populasi penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim.

Secara lebih spesifik, banyak program-program BNPT, semisal seminar deradikalisasi, selalu menyasar kalangan Islam radikal. Hal tersebut menimbulkan dua implikasi, yaitu, *Pertama*, melekatnya kata Islam sendiri adalah perihal yang sensitif, yang dapat memicu ketidaksepahaman antara pemerintah dengan Muhammadiyah sebagai ormas Islam besar. Lalu, *Kedua*, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam memandang penggunaan terminologi 'radikal, radikalisme, dan deradikalisasi'. Menurut Riefqi Muna dan Abdul Mu'ti dari Muhammadiyah, radikal memiliki makna positif. Namun karena disalahartikan seperti halnya *jihad*, maka makna radikal berubah negatif. Radikal berasal dari kata *radics* (akar), sehingga pemahaman radikal dapat diartikan sebagai pemahaman yang mengakar. "Apa yang salah dengan keimanan atau pemahaman yang mengakar? Amien Rais pernah mengatakan bahwa, dalam konteks religi, jika keimanan seorang umat mengakar, maka keimanannya tidak akan mudah goyah".⁴¹ Abdul Mu'ti sependapat, dengan mengatakan bahwa jika orang Islam ingin beragama dengan baik, dia harus radikal dengan keislamannya.

Masalahnya, konstruksi pemahaman barat meletakkan terminologi 'radikal' identik dengan eksklusifitas komunitas, atau pada tingkatan yang lebih ekstrim, 'violence'.

⁴⁰ Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

⁴¹*Ibid.*

Padahal, tidak semua yang radikal dalam beragama menjadi eksklusif dan melakukan tindak kekerasan.

“Saya radikal, saya puritan, namun saya inklusif dan tidak mengapa bergaul dengan banyak pihak. Jika mereka mengatakan bahwa puritan menjadikan seseorang eksklusif dalam konteks hubungan sosial, itu tidak benar. Terkait teologi, maka harus eksklusif. Orang Islam harus menyembah pada Allah dan tidak boleh pada ‘Allah dan lain-lain’. Orang Islam harus sholat sesuai dengan tuntunan yang benar dan tidak bisa dengan tuntunan yang umum. Saya pribadi kepada NU dan kaum non-muslim dapat ber-interaksi dan bekerjasama dengan baik (dalam konteks hubungan sosial). Namun terkait akidah, tidak bisa”.⁴²

Ketika seorang teroris mengatakan diri dan kelompoknya adalah kaum radikal; maka konsep radikal seperti itu adalah konsep radikal dalam pikiran terbatas yang dia pahami atau dipahamkan oleh orang lain kepadanya. Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan nalar dan logikanya untuk melihat realita. Karena begitulah doktrin yang membatasi ruang berpikirnya. Maka Riefqi Muna kembali menegaskan bahwa:

“Generalisasi bahwa terorisme selalu bermotifkan *Islamic radicalism* adalah *dangerous presumption*. Bukan lagi praduga tak bersalah namun praduga bersalah terhadap Islam yang dianggap sebagai bagian terorisme, meskipun diciutkan lagi bahwa *lax specialist*-nya adalah *radicalism*. Terminologi radikal yang digaung-gaungkan ke publik bisa salah arah atau *misleading*, jika tidak diletakkan dalam gambaran yang lengkap”.⁴³

Sementara pada Perpres RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, radikalisme menjadi referensi pemerintah bagi ancaman terorisme di Indonesia - dan deradikalisasi sebagai salah satu metodologi anti terorisme; seperti tercantum sebagai tujuan BNPT, yaitu “Menurunnya ideologi radikal dan tindak kekerasan serta propaganda ideologi radikal”; visi BNPT, yaitu “Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme”; dan misi BNPT, yaitu “Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal”.

⁴² Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁴³ Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

Penulis lantas mencari tahu mengenai perspektif NU terhadap radikalisme Islam dalam konteks terorisme. Berbeda dengan Muhammadiyah, NU memandang bahwa radikalisasi Islam adalah pemahaman Islam yang sempit dan hanya kulit-kulitnya saja, sehingga menyebabkan sikap keras, tidak toleran, dan tidak memberikan gambaran yang indah terhadap Islam.⁴⁴ Dari penjelasan tersebut, penulis melihat perbedaan cukup mendasar antara Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi isu terorisme. Dalam konteks terminologi, misalnya, NU menyatakan bahwa organisasinya terbuka terhadap pemaknaan sesuai konteks. Sedangkan Muhammadiyah akan cenderung melihat terminologi tidak hanya sebagai sebutan, namun mengkaji lebih dalam dan substantif, dimana hal tersebut merupakan cerminan pemahaman ideologis Muhammadiyah yang lebih puritan.

Dari penjabaran diatas, penulis berpendapat bahwa terorisme merupakan isu yang sensitif bagi Muhammadiyah, dikarenakan dua hal, yaitu: *Pertama*, meskipun sama sekali tidak dapat dikaitkan antara satu sama lainnya, masyarakat awam akan cenderung memberikan stigma bahwa terorisme dan radikalisme Islam lebih melekat pada Muhammadiyah yang lebih puritan secara ideologis, *ketimbang* NU. *Kedua*, radikalisme dan deradikalisasi adalah konsep yang masih menjadi kontestasi. Sulit atau tidak ada indikator untuk mengukur apakah tingkat keberagamaan seseorang dapat digolongkan menjadi sangat radikal, radikal atau tidak radikal; kemudian pada taraf apa seseorang yang berpaham radikal dapat dikatakan salah atau *kebablasan*. Sementara, bagi Muhammadiyah pemaknaan dan pemahaman seseorang tentang keberagamaan sangat beragam. Ada yang tengah, ada yang sedikit radikal ke kiri atau ke kanan. Bagi Muhammadiyah, pikiran seseorang tidak dapat dihakimi. Seseorang yang radikal namun tidak memiliki niat untuk melawan hukum tidak dapat dipersalahkan. Sekali lagi, konsep radikalisme dan deradikalisasi adalah konsep yang masih menjadi perdebatan dan sarat akan kritisi bagi Muhammadiyah.

Kedua, Ideologi dan paradoks internasional. Secara ideologis, radikalisme Islam sangat terkait dengan tujuan purifikasi agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dari nilai-nilai yang dianggap menyimpang, yang diusung oleh paham salafisme dan wahabisme. Namun karena ekstrimnya pilihan politis beberapa aliran salafisme,

⁴⁴ Wawancara dengan Zakky Mubarak, 14 Desember 2011.

paradigma barat lantas melakukan generalisasi dengan mengatakan bahwa kaum salafi dan wahabi adalah kaum yang bertanggungjawab terhadap beberapa aksi terorisme internasional. Paradigma itulah yang lantas diadopsi mentah-mentah oleh banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

“Padahal, Muhammadiyah kan salafi, bahkan Azyumardi Azra menyebut Muhammadiyah sebagai kelompok salafi tengah. Hanya bagaimana Muhammadiyah memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah serta mengimplementasikan purifikasi akidah berbeda dengan kelompok garis keras. Muhammadiyah tidak pernah setuju penggunaan cara-cara kekerasan”.⁴⁵

Salafisme memiliki banyak varian, sehingga tidak bisa digeneralisir. Tidak semua salafi, tidak semua wahabi, adalah teroris atau orang-orang yang memilih jalur-jalur kekerasan untuk melakukan purifikasi akidah atau untuk mencapai tujuan politisnya.

“Jamaah *tabligh* adalah salafi, namun mereka tidak setuju dengan aksi terorisme. Bahkan mungkin Baasyir, saya membaca pernyataannya di media massa, jika dia jujur, bahwa dia ingin menegakkan Syariat Islam (di Indonesia) memang iya, namun dia juga tidak menyetujui pemakaian aksi-aksi kekerasan, seperti bom bunuh diri”.⁴⁶

Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengatakan bahwa sumber ideologis terorisme adalah *neo-Khawarij*, yang berbeda dengan wahabisme dan merupakan spektrum paling keras dari salafisme.⁴⁷

Dalam tulisannya yang berjudul “Komodifikasi Terorisme”, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa latar belakang pelaku terorisme kini semakin beragam. Teori lama yang mengkaitkan terorisme dengan salafisme, wahabisme dan paham Islam puritan lainnya sudah usang. Tidak sedikit aktor terorisme yang berasal dari kalangan keluarga

⁴⁵Wawancara dengan A. Mu’ti, 7 Oktober 2011.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Azyumardi Azra, 10 Januari 2011, korespondensi *Email*.

Ahlussunnah yang moderat.⁴⁸ Mu'ti menambahkan bahwa latar belakang pelaku bom Cirebon malah sangat NU.⁴⁹

Ketiga, konsep pluralisme beragama, dimana Muhammadiyah mendorong dan memandang cara-cara berpikir pluralis sebagai *sunatullah*. Seperti telah disebutkan, pikiran tidak bisa diadili dan seseorang tidak bisa memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Muhammadiyah tidak bermasalah dengan pemahaman Islam radikal, sejauh tidak diterjemahkan menjadi tindak kekerasan. Oleh karena itu, Muhammadiyah memandang skeptis konsep deradikalisasi.⁵⁰

Keempat, penanganan terorisme melalui deradikalisasi.⁵¹ Anti terorisme adalah upaya-upaya untuk mengurangi, menghilangkan serta mencegah potensi terorisme melalui *soft approach*. Lalu, bagaimana anti terorisme diimplementasikan dalam sebuah metodologi? Apakah harus selalu memakai metodologi yang dikehendaki oleh kerangka makro *global war on terror*? Muhammadiyah tidak berpikir seperti itu. Menurut Muhammadiyah, metodologi atau pendekatan anti terorisme tidak harus sama dengan *framework global*, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep deradikalisasi. Jika berpatokan pada “*systematic targeted current program on anti terrorism*”, sebagaimana yang dipahami dan dipahamkan diskursus mainstream global kepada negara-negara di seluruh dunia, dimana strategi dan program anti terorisme seolah-olah harus seperti yang digariskan oleh Pentagon atau CIA, hal tersebut tidaklah *visible* di Muhammadiyah bahkan NU.

Meskipun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah tidak berperan dalam upaya anti terorisme.⁵² Metodologi anti terorisme menurut Muhammadiyah,

⁴⁸A. Mu'ti, 23 Juni 2011, “Komodifikasi Terorisme?” dalam

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/23/komodifikasi-terorisme/>, diunduh pada 19 Desember 2011.

⁴⁹Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁵⁰Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011. Deradikalisasi dipahami sebagai upaya untuk membuat pemahaman tidak radikal. Padahal tidak ada indikator untuk mengukur suatu pemahaman radikal dapat dikatakan berbahaya atau tidak. Kekhawatiran Muhammadiyah terbukti. Lima ormas berbasis Islam radikal, pada 18 Desember 2011, yaitu Gerakan Reformasi Islam (Garis), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI); menyatakan penolakannya terhadap proyek deradikalisasi BNPT. Menurut mereka, deradikalisasi adalah upaya penjajahan baru, yang secara sistematis memecah belah umat Islam, menangkai akidah sekaligus mengampusti perkembangan gerakan Islam. Lihat di M. Budi, 19 Desember 2011, “5 Ormas Islam Tolak Proyek Deradikalisasi Eks Teroris”, dalam <http://www.detiknews.com/read/2011/12/19/100222/1794200/10/5-ormas-islam-tolak-proyek-deradikalisasi-eks-teroris>, diunduh pada 19 Desember 2011.

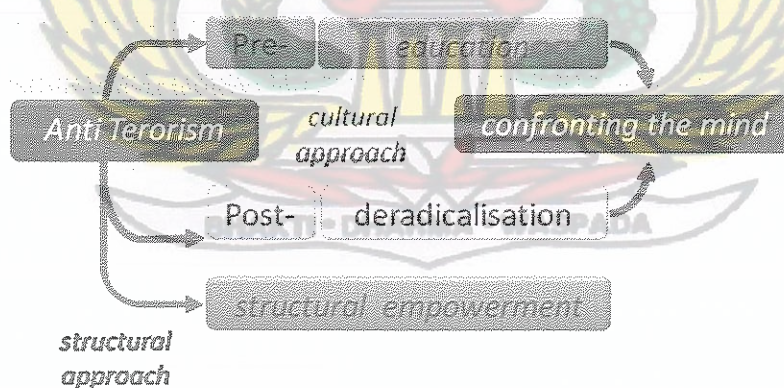
⁵¹Azyumardi Azra mendefinisikan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dan ‘penyembuhan’ orang atau kelompok radikal, Azyumardi Azra, korespondensi Email, 10 Januari 2011.

⁵²Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

dilakukan dengan tiga cara, yaitu: *Pertama, Pre-efforts*, dalam rangka mencegah pemahaman yang salah dan menanamkan pemahaman yang benar, melalui pendidikan yang secara konsisten dikembangkan oleh Muhammadiyah.

“Substantial anti terrorism is confronting the mind that violence is the only mean. Pre-efforts is through the way of teaching and preaching system. Education reduces the possibility of misunderstanding, yang berpengaruh pada cara berpikir masyarakat. If someone is educated, they become more enlighten, free thinking, do better. Tidak menggunakan cara picik, violence untuk menyampaikan tuntutannya”.⁵³

Kedua, Post-efforts atau deradikalisasi yang digaungkan oleh banyak pihak, namun tidak begitu populer bagi Muhammadiyah; *Ketiga*. Pendekatan struktural melalui pemberdayaan masyarakat sosial. Muhammadiyah memiliki konsep bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* sehingga adalah kewajiban untuk menegakkan ‘*sustainable peace and development*’ melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, sosial politik dan ekonomi, terutama pada tataran masyarakat bawah



Gambar 7. Upaya Anti Terorisme Menurut Muhammadiyah

Terkait konsep dan program deradikalisasi pemerintah, Muhammadiyah memiliki beberapa kritik, yaitu, *Pertama*, Muhammadiyah berpandangan bahwa tujuan deradikalisasi tidak sinkron dengan tujuan anti terorisme. Jika ada orang yang berpaham

⁵³Ibid.

agama radikal namun tidak berkeinginan untuk melakukan teror, apa gunanya program deradikalisasi? Begitupun sebaliknya, ketika ada orang yang berpaham agama dangkal, namun berniat untuk melakukan teror, program deradikalisasi pun tidak artinya.

“Reduksi atas pemikiran anti terorisme oleh *western analytical thinking* seolah-olah itu (deradikalisasi). Namun, *do you belief that somebody who commit violence means*, bisakah seseorang tersebut diajak diskusi untuk deradikalisasi? Deradikalisasi tidak sama anti terorisme. Orang yang berpikiran untuk *commit* melakukan *violence* tidak bisa di-deradikalisasi. *How to educate how to channel ideas* menjadi penting”.⁵⁴

Kedua, Seminar vs Man to Man Approach. Muhammadiyah menilai BNPT selama ini terkesan hanya bekerja dari balik meja dengan mengadakan seminar-seminar deradikalisasi selama satu atau dua hari. Padahal pola rekrutmen terorisme tidak melalui seminar-seminar, melainkan pendekatan orang per-orang (*man to man approach*). Dibutuhkan pendampingan dan pembimbingan, yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh BNPT. Ada kesan bahwa seminar-seminar deradikalisasi BNPT hanya merupakan ‘proyek internasional’ pemerintah, dengan BNPT sebagai operatornya.⁵⁵ Ketika penanganan terorisme berpotensi menjadi komoditas dalam bentuk proyek-proyek berdana, maka seminar-seminar yang diadakan tidak akan menyentuh substansi dan akar permasalahan terorisme. Ketiga, penyebutan ‘deradikalisasi’ sendiri menimbulkan stigma negatif, bahwa seakan-akan peserta program tersebut telah atau berpotensi berpaham radikal. Sebenarnya, Muhammadiyah dahulu sering mengadakan seminar-seminar deradikalisasi secara mandiri. Namun, seringkali dalam forum tersebut, beberapa warga Muhammadiyah ‘menuduh’ bahwa program deradikalisasi tersebut adalah program pemerintah kepanjangan tangan pihak asing.⁵⁶ Bambang Pranowo mengatakan bahwa program-program BNPT seharusnya tidak menonjolkan kesan anti terorisme dan deradikalisasi-nya. Karena, penghimpunan masyarakat tidak akan efektif jika sudah

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ M. Budi, 19 Desember 2011, “5 Ormas Islam Tolak Proyek Deradikalisasi Eks Teroris”, dalam <http://www.detiknews.com/read/2011/12/19/100222/1794200/10/5-ormas-islam-tolak-proyek-deradikalisasi-eks-teroris>, diunduh pada 19 Desember 2011.

⁵⁶Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

terstigma.⁵⁷ Deradikalisasi juga memunculkan kesan eksklusifitas, sehingga program menjadi kurang populer dan gagal menyentuh masyarakat sebanyak-banyaknya.

Kelima, adalah politisasi terorisme, seperti dinyatakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti "Masalahnya terdapat banyak faktor dan agenda di balik aksi terorisme, dan bisa jadi pola pemahaman yang dipakai oleh BNPT dan polisi saat ini adalah pola konspirasi". Sikap pemerintah terkesan membingungkan. Contohnya mengenai penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, serta penentuan Majelis Mujahidin Indonesia dan Ansyarud Tauhid sebagai target operasi polisi. "Apakah ingin menarget paham radikal, organisasi atau Ba'asyir-nya?"⁵⁸ Padahal Abdul Mu'ti, Ba'asyir dan jaringannya yang terbatas bukan ancaman yang berbahaya bagi masyarakat. Gagasan-gagasannya tidak berdasarkan pemahaman agama yang kuat, tidak membumi, tidak akan populer bagi masyarakat, sehingga tidak akan berbahaya.⁵⁹ Terkait hal itu, salah satu editor Harian Republika Rahmad Budi Raharjo berasumsi bahwa Indonesia membutuhkan jawaban atas tekanan internasional terkait siapa aktor intelektual yang bertanggungjawab terhadap aksi terorisme di Indonesia dan yang menghubungkan jaringan terorisme di Indonesia dengan jaringan terorisme internasional? Bisa jadi Indonesia tidak memiliki dan gagal mengetahui jawaban itu, karena begitu kompleksnya ancaman keamanan di Indonesia. Bisa jadi Ba'asyir hanya kambing hitam pemerintah yang gagal menemukan akar penyebab aksi terorisme di Indonesia.⁶⁰

Kemudian, Abdul Mu'ti dalam tulisannya juga mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan publik jika pemberantasan terorisme adalah 'proyek internasional'.⁶¹ Selepas tragedi 9/11, AS menggelorakan kampanye 'global war on teror', termasuk kampanye Reformasi Sektor Keamanan internasional. AS dan aliansinya menggelontorkan dana besar dan melakukan berbagai bentuk kerja sama keamanan dengan negara-negara di dunia, khususnya negara-negara yang rawan terhadap ancaman terorisme, seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Filipina, termasuk Indonesia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sektor keamanan di negara-negara tersebut. Di

⁵⁷ Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012.

⁵⁸ Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁵⁹ Wawancara dengan A. Mu'ti, 23 Juni 2011; "Komodifikasi Terorisme?" dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/23/komodifikasi-terorisme/>, diunduh pada 19 Desember 2011,

⁶⁰ Wawancara dengan R.B. Harto, 15 Desember 2011.

⁶¹ A. Mu'ti, "Komodifikasi Terorisme?", *Op. Cit.*

Indonesia, kampanye tersebut terimplementasi, salah satunya melalui pembentukan dan pelatihan Densus 88. Bantuan internasional tersebut sayangnya berimplikasi pada pertanyaan masyarakat terhadap akuntabilitas dan independensi pemerintah akan pengaruh pihak asing dalam penanganan sektor keamanan nasional. Abdul Mu'ti meragukan bahwa Densus 88 adalah *genuinely* proyek pemerintah. Dananya tidak mungkin dari APBN, karena tidak ada audit, sehingga Abdul Mu'ti mempertanyakan dari mana asal dana tersebut. Menurutnya, dana hibah atau hutang harus *clear dan stated*.⁶²

Tuduhan-tuduhan semacam diatas, jika gagal diantisipasi oleh pemerintah, dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat; akan berimplikasi pada sinisme masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan sektor keamanan nasional, serta independensi pemerintah dari pengaruh pihak asing. Kegagalan tersebut turut andil mengembangkan motif terorisme di Indonesia, dari yang awalnya radikalisme agama, menjadi kebencian terhadap pemerintah dan jajarannya.

Keenam, Muhammadiyah lebih sependapat jika akar permasalahan terorisme adalah lemahnya dukungan struktural pemerintah terhadap masyarakat, seperti tidak meratanya kesejahteraan sosial, tidak terselenggaranya penegakan hukum yang adil, dan tata pemerintahan yang buruk.⁶³ Permasalah agama sesungguhnya hanya bersifat katalis.⁶⁴

Ketidakepahaman antara Muhammadiyah dan pemerintah terkait enam aspek diatas berimplikasi pada pernyataan dan sikap-sikap Muhammadiyah yang *clear* dan tidak berani memberikan labelisasi, berhati-hati dan terkesan tidak reaktif. Terkait maraknya tuduhan 'proyek deradikalisasi' pemerintah, Muhammadiyah menunjukkan kesan tidak ingin terlibat banyak karena tidak ingin terjebak komodifikasi terorisme.⁶⁵ Maka dari itu, Muhammadiyah tidak menjadikan terorisme sebagai prioritas teratas isu-isu strategis organisasi. Selain pendidikan dan pemberdayaan sosial ekonomi, Muhammadiyah lebih banyak menyikapi isu-isu politik, demokrasi dan *good governance*; yang memiliki *multiplier effect* lebih efektif untuk mengurangi potensi terorisme jangka panjang. Muhammadiyah tidak menolak dan menyatakan bahwa terorisme tidak ada, karena faktanya terorisme

⁶²Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

⁶⁵Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

memang ada. Di kalangan internal Muhammadiyah, keprihatinan terhadap ancaman terorisme cukup tinggi. Muhammadiyah juga tidak mengabaikan urgensi penanganannya. Ada tanggung jawab moral. Namun mereduksi segala persoalan dalam koridor anti terorisme dipandang oleh Riefqi Muna terlalu naif. Muna mengkritisi diskursus keamanan global pasca tragedi 9/11 dengan mengatakan bahwa dunia saat ini sedang terkena 'securonoid', yaitu pemendekan kata *security* dan *paranoid*, dimana semua hal lantas dikait-kaitkan dengan *counter terrorism effort*. Padahal jika menghitung dan membandingkan ribuan korban kecelakaan di jalan raya, dengan ratusan korban tewas akibat terorisme – mana yang lebih signifikan menjadi ancaman bagi masyarakat, apakah respon pemerintah logis atau tidak?⁶⁶ Kemudian, Muhammadiyah tidak membentuk program spesifik anti terorisme - oleh karena itu tidak pernah ada pengajuan proposal program kerjasama anti terorisme kepada BNPT - karena akan tetap 'going on' dengan peran-peran struktural dan kulturalnya, yang sebenarnya sarat muatan anti terorisme.

“Urusan Muhammadiyah adalah melakukan upaya-upaya kultural membangun kehidupan sosial beragama yang toleran, nir-kekerasan dan lebih adil. Muhammadiyah mengedepankan strategi kultural *system of belief*, dan akan berkomitmen pada jalur itu. Muhammadiyah berusaha merubah tatanan negara dengan merubah perilaku masyarakat, melalui individu, dan mempengaruhi *state of mind*. Muhammadiyah melakukan semua itu tanpa *labelling* anti terorisme. Muhammadiyah biasa-biasa saja, tidak lantas sibuk dengan ide deradikalisasi dll. Muhammadiyah going on dengan apa yang sudah dilakukan. Mau orang lain pakai deradikalisasi atau segala macam, Muhammadiyah tidak peduli”.⁶⁷

4.2. Konflik Politis

Muhammadiyah adalah organisasi *par-excellence*, *civil society* yang berfungsi sebagai kontrol kritis terhadap kinerja pemerintah. Kritik Muhammadiyah termasuk gencar menerpa periode pemerintahan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono. Friksi-friksi politis diyakini berdampak terhadap renggangnya hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah, seperti tercermin, sbb:

⁶⁶Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011.

⁶⁷Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

“Dalam masa dua tahun terakhir, pemerintah sepertinya ada *handicap* untuk membangun komunikasi dengan Muhammadiyah, termasuk BNPT juga tidak banyak melakukan komunikasi dengan Muhammadiyah, (mungkin) karena faktor perilaku birokrasi dalam menafsirkan sikap-sikap (kritis) Muhammadiyah (selama ini).⁶⁸

Bambang Pranowo mengakui bahwa terkadang kedekatan politis berpengaruh terhadap kuat renggangnya hubungan pemerintah dan masyarakat. Bambang menyebut nama Ali Anwar, yaitu wakil ketua NU yang merupakan mantan wakil ketua BIN. Hal tersebut secara informal pasti berpengaruh terhadap keakraban hubungan antara BNPT dan NU. Jusuf Warsim juga mengatakan bahwa Muhammadiyah merasa lebih dirangkul dan lebih sering diajak berkomunikasi oleh pemerintah takkala wakil presidennya Jusuf Kalla.⁶⁹ Jika dicermati, Muhammadiyah pernah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kemenkopolkam, takkala posisi Menkopolkam dijabat oleh Patrialis Akbar.⁷⁰ Nota Kesepahaman Bersama juga dibangun antara Muhammadiyah dan KPK, ketika posisi ketua KPK dijabat oleh Busyro Muqodas. Jusuf Kalla, Patrialis Akbar dan Busyro Muqodas adalah kader-kader Muhammadiyah. Namun, Bambang Pranowo tidak setuju jika dikatakan terdapat konflik politis antara Muhammadiyah dan BNPT. Menurutnya, belum terbangunnya kerjasama antara Muhammadiyah dan BNPT hanya masalah pendekatan saja.⁷¹ Secara umum, Azyumardi Azra juga melihat bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah cukup baik. Konflik tersebut dipandang sebagai konflik personal antara Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.⁷² Tidak bisa dibaca bahwa sikap Din Syamsuddin merepresentasi sikap Muhammadiyah secara organisasi.⁷³ Kemudian, implikasi lain konflik politis adalah bahwa Muhammadiyah terkesan memandang program-program BNPT kurang apresiatif, seperti tercermin sbb: “Kerjasama itu hanya retorika. Mereka tidak

⁶⁸Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁶⁹ Wawancara dengan Y. Warsim, 24 Oktober 2011.

⁷⁰ Kemenkopolkam adalah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

⁷¹Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012.

⁷² Azyumardi.Azra, korespondensi *Email*, 10 Januari 2011.

⁷³Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012s.

melakukan apa-apa, jangan-jangan kerjasama tersebut dibuat tidak sebagai sebuah panggilan, melainkan formalitas untuk menggenapi syarat hukum”.⁷⁴

4.3. Kendala BNPT: Keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan anggaran

BNPT baru dibentuk pada tanggal 16 Juli 2010. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai BNPT, terkait kedudukan, tugas dan fungsinya. Program-program BNPT pun belum semua tersosialisasikan pada masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat BNPT tidak dapat mengakomodasi semua permintaan, seperti mendatangi *civil society* satu persatu. Oleh karena itu BNPT merangkul *civil society* yang sekiranya dapat dirangkul lebih dahulu.⁷⁵

4.4. *Political will* BNPT

Political will terkait bagaimana BNPT menerjemahkan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Visi dan Mandat BNPT yang menyebutkan bahwa pemerintah harus proaktif membangun sinergi, spirit dan komitmen seluruh komponen bangsa. Namun jikalau respon BNPT adalah sebagai berikut, maka kemungkinan pembangunan kerjasama antara BNPT dengan Muhammadiyah akan sulit terjadi.

“Tidak bisa kita menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat siapa yang melaksanakan apa ... Kita sudah proaktif, tapi masak kita harus datangi setiap pintu. BNPT hanya bicara, yang merespon silahkan datang...Anti terorisme kenapa terlalu bergantung dengan pemerintah? ... Jika dia datang (kita bantu). Dia harus datang. Dia butuh kok”.⁷⁶

Terkait pernyataan tersebut, penulis kurang setuju, karena, *Pertama*, BNPT adalah badan yang diamanatkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Hal tersebut

⁷⁴Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011.

⁷⁵Wawancara dengan A. Sanusi, 16 November 2011.

⁷⁶Wawancara dengan Irfan Muslich, 12 Januari 2012.

menyiratkan fungsi BNPT sebagai pemimpin yang mengarahkan, mengkoordinasi seluruh potensi masyarakat, dalam rangka penanganan terorisme secara efektif dan efisien.⁷⁷ Kedua, pemerintah seharusnya membutuhkan dukungan masyarakat, bukan sebaliknya. Terlebih, menurut suatu kajian, kemampuan arus besar Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU adalah bertahan tanpa bergantung pada negara.⁷⁸ Sebaliknya negara, mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Evaluasi

Hubungan kerjasama antara BNPT dan Muhammadiyah memiliki dua potensi, yaitu potensi ideologi dan potensi organisasi. *Potensi Ideologi* adalah bahwa Muhammadiyah dan NU memaknai Islam secara moderat. Kemudian Muhammadiyah, bersama-sama dengan NU, adalah arus utama Islam Indonesia. Seorang ulama NU Zakky Mubarak mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam NU jika bukan Muhammadiyah, sisanya adalah Islam yang mengadopsi model ideologis kedua ormas tersebut.⁷⁹ Sebagai arus utama, dua ormas tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini umat. Terlebih dalam suatu kajian, Islam di Indonesia adalah Islam *ummah*, yang sangat taat pada ideologi *mainstream* dan fatwa ulama. Kemudian, *Potensi Organisasi*, Muhammadiyah memiliki program, infrastruktur dan sistem yang mapan. Program-programnya adalah dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastrukturnya adalah dalam bentuk sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan system dan struktur organisasi telah terjalin kuat dari tingkat kelurahan sampai tingkat pusat, bahkan internasional. Program, infrastruktur dan sistem organisasi tersebut dapat digunakan untuk diseminasi informasi, menumbuhkan kesadaran publik dan menanamkan pemahaman. Kemudian, dalam konteks sumber daya manusia, Muhammadiyah memiliki jutaan umat yang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Muhammadiyah juga merupakan *civil society*, wahana bagi para ulama dan intelektual muslim untuk berkumpul, mewacanakan isu-isu strategis nasional dan merumuskan pemecahan masalah kebangsaan - sebagai elit keagamaan, para ulama dan

⁷⁷Sesuai teori manajemen, fungsi BNPT kemudian adalah sebagai berikut: *to plan, to organize, to command, to coordinate, dan to control.*

⁷⁸Rizal Sukma & C. Joewono, "Pendahuluan: Memetakan Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia Kontemporer", dalam Rizal Sukma, & C. Joewono (ed), *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: CSIS, 2007).

⁷⁹Wawancara dengan Zakky Mubarak, 14 Desember 2011.

kaum intelektual muslim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, tidak hanya dalam aspek keberagamaan, namun juga sosial dan politik.⁸⁰ Yang terakhir, selayaknya ormas besar lainnya, Muhammadiyah akan selalu menarik perhatian media.⁸¹

Potensi-potensi tersebut merupakan keuntungan bagi BNPT, karena, *Pertama*, kemudahan garis komando dalam diseminasi informasi. Seperti diakui oleh BNPT: “Program-program BNPT bertujuan untuk menyentuh masyarakat bawah secara langsung. Dengan Muhammadiyah dan NU, BNPT berharap bisa menjangkau dari tingkat keluarga hingga institusi yang lebih besar”.⁸² *Kedua*, efektifitas dan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya BNPT dalam rangka mencapai tujuan organisasi – terlebih seperti dikemukakan oleh Anwar Sanusi, kendala BNPT adalah waktu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran.

Kemudian, apakah dampaknya jika hubungan BNPT dan Muhammadiyah tidak terbangun? Sebenarnya tidak ada masalah jika hubungan BNPT dan Muhammadiyah tetap dalam kondisi seperti ini. Terlebih, karena Muhammadiyah dan BNPT merasa tidak memiliki masalah atau konflik antara satu sama lain. Menurut Irfan Muslich, meskipun proses dan metodologinya berbeda, sebenarnya Muhammadiyah dan BNPT menuju pada tujuan yang sama, yaitu mereduksi ancaman terorisme nasional. Menurut teori partisipasi, Muhammadiyah dapat dikatakan telah berpartisipasi secara tidak langsung terhadap program-program BNPT melalui peran-peran kultural dan strukturalnya. Peran-peran tersebut merupakan kontribusi pemikiran, dana, tenaga, dan sarana Muhammadiyah, dimana BNPT mengakui hal itu dan mengapresiasi positif peran-peran Muhammadiyah.⁸³

“Secara fisik (Muhammadiyah) tidak melibatkan diri namun secara substansi melibatkan diri. Deradikalisasi adalah bagaimana membuat, tidak terjadi, orang memiliki pemikiran sempit, sangat radikal. Ada banyak cara. BNPT dan Muhammadiyah mungkin menempuh jalan yang berbeda. Namun, pada akhirnya menuju pada suatu titik. Jika kita

⁸⁰Rizal Sukma, & C. Joewono, *Op. Cit.*

⁸¹Media memainkan peran penting dalam proses transformasi masyarakat dan membangun persepsi tentang agama dan politik. Lihat, F. Jabali & A. Subhan, “Intelektual Muslim dan Lahirnya Rumusan Baru Islam Indonesia dalam Rizal Sukma & C.Joewono. (ed.), *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: CSIS, 2007), hlm. 60-61.

⁸²Wawancara dengan Heri, 16 November 2011.

⁸³Wawancara dengan Irfan Muslich, 12 Januari 2012.

mencermati, Muhammadiyah lebih cerdas. Karena dia mengatakan, ada atau tidak BNPT, Muhammadiyah tetap bisa jalan”.⁸⁴

Menurut Irfan Muslich, BNPT merasa bahwa Muhammadiyah tidak bisa dipaksa bergabung. Mungkin Muhammadiyah memiliki strategi dan prioritas program tertentu, sehingga tidak memungkinkan bagi Muhammadiyah untuk bergabung dengan BNPT. BNPT juga memiliki prioritas. Yang belum merespon, mungkin belum saatnya dia terlibat. Mungkin ada *stressing* programnya nanti.⁸⁵ Terhadap hal diatas, peneliti dapat menerima pendapat BNPT;

Namun, apakah BNPT telah berupaya membangun komunikasi dengan Muhammadiyah? Jika belum, maka: *Pertama*, BNPT dapat dikatakan belum berhasil menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Visi BNPT yang menyebutkan bahwa pemerintah proaktif membangun sinergi dengan masyarakat. *Kedua*, BNPT belum tampil memimpin, merencanakan, mengarahkan, serta mengkoordinasi seluruh potensi masyarakat. Karena sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, BNPT adalah badan yang berwenang untuk melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. *Ketiga*, secara substantif, BNPT belum tampil sebagai organisasi kebangsaan yang seharusnya mampu menyatukan persepsi masyarakat terhadap isu-isu terorisme. Ada kesan, bahwa BNPT cenderung merangkul *civil society* yang se-visi dan membiarkan yang tidak. *Keempat*, ketidakterlibatan Muhammadiyah membuat upaya-upaya BNPT relatif kurang efektif dan efisien.

Saran

Berangkat dari evaluasi tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Penguatan komitmen BNPT dan Muhammadiyah.

Pertama, dalam pembangunan kerjasama dengan *civil society*, BNPT berkomitmen tidak pilih kasih dan tidak ada unsur politis yang terlibat. Komitmen tersebut seharusnya

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

diterjemahkan pada tataran riil. Azyumardi Azra mengimbau agar jangan ada kesan pemerintah hanya berbasa-basi dan tidak menangani terorisme secara komprehensif, dengan tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti instansi pemerintah, organisasi dan lembaga masyarakat, institusi pendidikan, keluarga, dsb.⁸⁶ Karena pernah di salah satu media diberitakan bahwa Muhammadiyah mengadakan seminar bertema terorisme dan mengundang Ansyaad Mbaai sebagai pembicara. Namun tanpa alasan yang jelas, Ansyaad Mbaai maupun perwakilan BNPT tidak hadir, dimana hal tersebut disesalkan oleh Din Syamsuddin dan Busyro Muqoddas.⁸⁷

Kedua, dalam arah kebijakan dan strategi nasionalnya, BNPT berkomitmen proaktif untuk meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara. Maka menjadi kurang tepat jika BNPT merasa telah proaktif, dengan hanya berbicara di berbagai media, kemudian menunggu *civil society* yang potensial untuk datang pada BNPT.

Ketiga, sebagai badan yang berwenang untuk melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi, BNPT harus tampil memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh potensi masyarakat dalam upaya anti penanganan terorisme.

Selain BNPT, Muhammadiyah juga perlu kembali menegaskan komitmen organisasi dan konsisten dalam pengimplementasiannya. *Pertama*, Muhammadiyah akan segera melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah, dengan lebih bijak dan netral dalam mengambil sikap politik.⁸⁸ *Kedua*, Muhammadiyah akan menguatkan komunikasi dan membangun kerjasama strategis dengan berbagai instansi pemerintah⁸⁹. Pada tataran operasional, pernyataan-pernyataan tersebut seharusnya diterjemahkan menjadi sikap-sikap Muhammadiyah yang apresiatif dan partisipatif terhadap program-program BNPT. Sehingga, Muhammadiyah tidak lantas menunggu ajakan pemerintah, melainkan secara aktif mendekati dan terlibat dalam program-program BNPT. Terlebih karena BNPT adalah

⁸⁶ Azyumardi Azra, korespondensi *Email*, 10 Januari 2011.

⁸⁷ R. Diputra, 1 April 2011, "Din Kecewa Terorisme Selalu Dikaitkan dengan Islam", dalam <http://news.okezone.com/read/2011/04/01/339/441145/din-kecewa-terorisme-selalu-dikaitkan-dengan-islam>, diunduh pada 2 Januari 2011.

⁸⁸ Laporan PP Muhammadiyah 2005-2010.

⁸⁹ Visi Partisipasi Kebangsaan Muhammadiyah 2015.

badan yang baru dan memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Ketiga, Muhammadiyah akan mengembangkan peran strategis untuk turut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan nasional, agar berjalan sesuai cita-cita luhur bangsa.⁹⁰ Secara eksternal, Muhammadiyah adalah organisasi *par-excellence* yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah pada ranah loyal kritis⁹¹, Secara internal, Muhammadiyah dapat menempatkan kader-kadernya dalam posisi mempengaruhi atau menentukan kebijakan. Sehingga, tidak bisa tidak, Muhammadiyah seharusnya terlibat dan bergerak bersama BNPT dalam rangka mengkomunikasikan urgensi perubahan jika merasa kebijakan, strategi dan program-program BNPT tidak tepat sasaran. Jangan sampai, idealisme Muhammadiyah dalam menyikapi isu-isu yang bersinggungan dengan ranah ideologi/teologi, namun sebenarnya tidak substansial, seperti perdebatan etimologi dan terminologi, membuat organisasi ini terkesan kaku dan kurang dinamis dalam menyikapi isu-isu kontekstual yang mengancam masyarakat. Sehingga, menghindarkan Muhammadiyah untuk berperan lebih strategis dan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perlu dipertimbangkan bahwa, pembangunan kerjasama dengan BNPT juga membuka kesempatan ekstensifikasi, penguatan frekuensi dan *magnitude* program Muhammadiyah sehingga memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.

2. Pembangunan Komunikasi BNPT dan Muhammadiyah

Pembangunan komunikasi dalam rangka mengkomunikasikan perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak. Indikator bahwa komunikasi antara BNPT dan Muhammadiyah selama ini belum terbangun adalah pandangan Muhammadiyah bahwa BNPT selama ini hanya melakukan seminar-seminar yang dipandang tidak menyentuh akar permasalahan terorisme. Namun, yang Muhammadiyah tidak tahu adalah bahwa tujuan BNPT gencar melakukan seminar-seminar adalah dalam rangka sosialisasi organisasi dan program-program BNPT yang baru dan masih belum banyak diketahui masyarakat. Pendekatan individual, telah dilakukan oleh Satgas BNPT dan ormas atau lembaga masyarakat yang bekerjasama dengan BNPT.

⁹⁰Visi 2015 dan Pernyataan Revitalisasi Kader.

⁹¹Seperti disampaikan Din Syamsuddin dalam Pembukaan Muktamar Seabad Muhammadiyah.

“Seminar deradikalisasi hanyalah langkah awal dalam rangka pengenalan, pemahaman. Semuanya jalan simultan. Yang menyoroti bahwa deradikalisasi tidak jalan adalah karena (yang bersangkutan) tidak tahu program deradikalisasi secara keseluruhan”.⁹²

Kemudian, terkait perdebatan terminologi dan generalisasi nilai-nilai Islam sebagai referensi terorisme seperti radikalisme, salafisme atau wahabisme, BNPT menghimbau agar Muhammadiyah terlibat sehingga bisa dinetralisir. Jika tinggal diam, masyarakat akan tetap memahaminya seperti itu. *Image* tersebut akan terbangun.⁹³

Azyumardi Azra memandang positif kemungkinan pembangunan komunikasi kerja sama antara BNPT dengan Muhammadiyah. “Seharusnya (BNPT dan Muhammadiyah) bisa bekerjasama, namun perlu usaha atau pendekatan personal dengan berbagai tokoh Muhammadiyah baik di tingkat nasional maupun daerah”.⁹⁴

Amanat kebijakan, menempatkan BNPT sebagai pihak yang memiliki urgensi lebih dalam pembangunan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga akan lebih bijaksana jika BNPT lebih proaktif lagi untuk mendekati Muhammadiyah, *ketimbang* sebaliknya. Jangan sampai timbul kesan, BNPT hanya merangkul *civil society* yang se-visi dan membiarkan yang tidak. Kemudian, setelah komunikasi terbangun, maka kepercayaan perlu diperkuat bagi keduanya untuk membuka kemungkinan kerjasama demi mencapai tujuan bersama. Seperti tersirat dari himbauan Irfan Muslich,

“Mari kita duduk bersama, jangan merasa benar dan menyalahkan orang lain. Jika belum paham, (jangan) *sounding, share* atau berbicara di media. (BNPT terbuka untuk) melibatkan semua masyarakat dan mengajak berdiskusi, apa yang bisa dilakukan oleh ormas ini, apa yang bisa dilakukan oleh ormas ini”.⁹⁵

⁹²Wawancara dengan Irfan Muslich, 12 Januari 2012.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Azyumardi Azra, korespondensi *Email*, 10 Januari 2011.

⁹⁵Wawancara dengan Irfan Muslich, 12 Januari 2012.

Terakhir adalah penguatan forum koordinasi BNPT, sehingga Muhammadiyah dapat melakukan fungsi aspirasinya dan BNPT dapat melakukan pembenahan terkait kebijakan, strategi dan program, jika dirasa masukan dari Muhammadiyah sesuai dengan Visi dan Misi BNPT. Muhammadiyah juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah terkait isu-isu politisasi dan komodifikasi terorisme.

3. Inovasi Konsep Deradikalisasi BNPT

Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan terkait isu dan penanganan terorisme dengan konstruksi pemahaman global yang berimplikasi terhadap sikap-sikap Muhammadiyah sbb: tidak menjadikan terorisme sebagai isu prioritas, tidak membuat program terorisme, tidak mengajukan program kerjasama pada BNPT melainkan tetap melakukan peran-peran kultural dan strukturalnya dalam masyarakat. Sikap tersebut secara tidak langsung menghambat pembangunan kerja sama antara BNPT dan Muhammadiyah. Namun, yang menarik adalah bahwa Muhammadiyah justru menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Pemerintah Australia untuk mengadakan pendidikan demokrasi, toleransi, Hak Asasi Manusia. Selain itu, Muhammadiyah juga membangun kerja sama dengan *Peace Corps* AS untuk mengadakan pendidikan bahasa Inggris oleh guru *native* di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Kedua program itu jika dirunut merupakan bagian dari kampanye “*global war on terror*”, yang diinisiasi oleh pemerintah Australia sebagai respon terhadap tragedi Bom Bali, yang rupanya diapresiasi dengan baik oleh Muhammadiyah.

Maka, patut dipikirkan secara kritis, mengapa Muhammadiyah yang menyatakan penolakannya terhadap konstruksi pemahaman global tentang terorisme, setuju bekerja sama dengan institusi asing, namun tidak dengan badan nasional, yaitu BNPT. *Pertama*, program-program tersebut dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan struktural dan kultural. Sedangkan, seperti diakui Irfan Muslich, strategi anti terorisme BNPT melalui pendekatan struktural masih rapuh. *Kedua*, pada program-program tersebut tidak melekat labelisasi deradikalisasi, sehingga berjalan lebih populer.

Selama ini, ada kesan bahwa BNPT belum memiliki konsep anti terorisme yang jelas. Padahal, dengan pelibatan *civil society* yang komprehensif, BNPT dapat memetakan

potensi-potensi masyarakat yang ada untuk berperan sesuai kapasitas, kapabilitas dan prioritas masing-masing dalam upaya anti terorisme nasional. Maka dari itu, sangatlah penting bagi BNPT untuk dapat mengembangkan, berinovasi terhadap konsep deradikalisasi, yang sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia; dengan memadukan pendekatan struktural dan kultural; dalam rangka mereduksi potensi terorisme; dengan efektif, efisien, berdampak jangka panjang dan menjangkau masyarakat luas.

4. Sosialisasi

Perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran sosialisasi BNPT agar lebih terstruktur dan merata. Kemudian seharusnya dilakukan penghilangan labelisasi deradikalisasi pada program-program BNPT.

Kesimpulan

Studi ini mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa sebagai civil society, Muhammadiyah telah melakukan upaya anti terorisme, melalui peran-peran struktural dan kulturalnya, meskipun tanpa 'heading' anti terorisme. Kedua, pemerintah belum melibatkan civil society secara komprehensif dalam upaya anti terorisme; yang dibuktikan dengan belum terbangunnya kerangka kerjasama BNPT dan Muhammadiyah selama ini. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksepahaman pandangan antara BNPT dan Muhammadiyah terhadap isu dan penanganan terorisme; konflik politis antara pemerintah dan Muhammadiyah, sebagai implikasi kritik konstruktif Muhammadiyah yang gencar ditujukan pada pemerintah; keterbatasan waktu dan sumber daya BNPT; serta rendahnya political will BNPT. Padahal sebagai ormas Islam besar, Muhammadiyah memiliki potensi ideologi dan organisasi untuk berperan sebagai partner pemerintah dalam upaya anti terorisme nasional. Maka dari itu, penelitian ini mengajukan empat saran, yaitu penguatan komitmen BNPT dan Muhammadiyah, pembangunan komunikasi antara BNPT dan Muhammadiyah, evaluasi dan inovasi konsep deradikalisasi, serta penguatan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 10 Januari 2011. *Korespondensi Email*.
- Budi, M. 19 Desember 2011. "5 Ormas Islam Tolak Proyek Deradikalisasi Eks Teroris", dalam <http://www.detiknews.com/read/2011/12/19/100222/1794200/10/5-ormas-islam-tolak-proyek-deradikalisasi-eks-teroris>, diunduh pada 19 Desember 2011.
- "BNPT urged to design terrorism prevention programs". *Thejakartapost.com*. 19 April 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/19/bnpturged-design-terrorism-prevention-programs.html>, diunduh pada 24 Oktober 2011.
- "BNPT-Ormas Islam Siapkan Deradikalisasi Teroris", 11 Agustus 2011, dalam http://www.jurnas.com/news/37009/BNPT-Ormas_Islam_Siapkan_Deradikalisasi_Teroris/1/Nasional/Hukum, diunduh pada 8 Desember 2011.
- Crelinsten, R. 2009. *Counter Terrorism*. Cambridge UK: Polity Press.
- Diputra, R. 1 April 2011. "Din Kecewa Terorisme Selalu Dikaitkan dengan Islam", dalam <http://news.okezone.com/read/2011/04/01/339/441145/din-kecewa-terorisme-selalu-dikaitkan-dengan-islam>, diunduh pada 2 Januari 2011.
- Fitz-Gerald, A. M. 2 Februari 2010. *Security Sector Reform: Theory and Practice*. Module of Indonesia Defense University and Cranfield University.
- Gatot. 7 September 2009. "Kebutuhan Program Deradikalisasi untuk Pemberantasan Terorisme", *Center for Detention Studies*, dalam http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=5, diunduh pada 14 September 2011.
- Himpunan Peraturan tentang Penanggulangan Terorisme. 2011. Jakarta: BNPT.
- "Hadapi Kelompok Garis Keras, Banser NU Bentuk Densus 99", 7 Juli 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/18/logz41-hadapi-kelompok-garis-keras-banser-nu-bentuk-densus-99>, diunduh pada 8 Desember 2011.
- Jabali, F. & A. Subhan. 2007. "Intelektual Muslim dan Lahirnya Rumusan Baru Islam Indonesia dalam Rizal Sukma & C.Joewono. (ed.). *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: CSIS.
- Laporan PP Muhammadiyah 2005-2010.
- Mulyadi, I. S. 3 Oktober 2011. "Muhammadiyah Tidak Dilibatkan Deradikalisasi", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/03/2245443/Muhammadiyah.Ti>, diunduh pada 24 Oktober 2011.
- Maley, T. 2011. *Democratic Response to Terrorism*. Module of Indonesian Defense University and Cranfield University.
- Markus, S. 2011. "Mengukur Peran Muhammadiyah di Ruang Publik Menuju Peradaban Utama. Di Muhammadiyah". *Kajian Ramadhan 1431 H*. Jakarta: Muhammadiyah.
- Mu'ti, A. 23 Juni 2011. "Komodifikasi Terorisme?" dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/23/komodifikasi-terorisme/>, diunduh pada 19 Desember 2011.
- Perwita, A. A. 2005. "Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Putri, Rima S.I. 2011. *BNPT dan Civil Society, Studi Kasus: Ketidakterlibatan Muhammadiyah Dalam Nota Kesepahaman Bersama Antara BNPT dan Organisasi Massa Islam*. Tesis (on progress). Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah*.

- Perpres RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT Pasal 23.
- Perpres RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT Pasal 36 ayat (1).
- Program Muhammadiyah 2010-2015.
- Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014*. 2011. Jakarta: BNPT.
- Saputra, C. N. 11 Agustus 2011. "BNPT dan Ormas Islam Teken MoU Pencegahan Terorisme", dalam <http://news.okezone.com/read/2011/08/11/337/490871/bnpt-ormas-islam-> diunduh pada 24 Oktober 2011.
- Sukma, Rizal & C. Joewono. 2007. "Pendahuluan: Memetakan Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia Kontemporer", dalam Rizal Sukma, & C. Joewono (ed). *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: CSIS.
- Surwandono, "Dialektika NU dan PKB", dalam surwandono.staff.umy.ac.id/page/files/.../DIALEKTIKA-NU-DAN-PKB.do, 2011.
- "Tewasnya Osama Tidak Mengurangi Aksi Teroris di Indonesia". *FaktaPos.com*. 3 Mei 2011, dalam <http://www.faktapos.com/content/nasional/5850-tewasnya-osama-tidak-mengurangi-aksi-teroris-di-indonesia.html>, diunduh pada 13 September 2011.
- Visi Partisipasi Kebangsaan Muhammadiyah 2015.
- Visi 2015 dan Pernyataan Revitalisasi Kader.
- Wawancara dengan A. Mu'ti. 7 Oktober 2011.
- Wawancara dengan Riefqi Muna. 14 Oktober 2011.
- Wawancara dengan Y. Warsim. 24 Oktober 2011.
- Wawancara dengan A. Sanusi. 16 November 2011.
- Wawancara dengan Heri. 16 November 2011.
- Wawancara dengan Zakky Mubarak. 14 Desember 2011.
- Wawancara dengan Rahmat Budi Harto. 15 Desember 2011.
- Wawancara dengan Bambang Pranowo. 12 Januari 2012.
- Wawancara dengan Irfan Muslich. 12 Januari 2012.
- Zainudin, N.D., Edralin dan Whitaker dalam Keban dan S. Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

